

SKRIPSI
KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) KOTA PADANG DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NOFRIADI MARPAUNG

1910012111002

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg: 10/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg:10/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : NOFRIADI MARPAUNG
NPM : 1910012111002
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP) KOTA PADANG DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Sebelas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R.,S.H.,M.H (Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.10 Reg:/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023


Nama : NOFRIADI MARPAUNG
NPM : 1910012111002
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : KEWENANGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMTSP) KOTA PADANG DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr.Boy Yendra Tamin,S.H.,M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti,S.H.,M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PADANG DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nofriadi Marpaung¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H¹.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: nofriadimarpaung21@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kewenangan dalam mengurus perizinan di Kota Padang termasuk kedalam kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan Pelayanan Perizinan? 2) Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan perizinan di Kota Padang? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelayanan perizinan? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, data yang terkumpul di analisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Pelaksanaan pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan pelayanan perizinan, mengurus surat izin usaha. 2) Terdapat kendala secara internal dan eksternal. 3) Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: terbentuknya kesepakatan bersama untuk meningkatkan SDM, Sumber Daya Aparatur lebih disiplin dalam pekerjaannya, diterapkan sikap profesionalitas pada setiap pegawai dalam bekerja, untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Kewenangan, Pelayanan Perizinan, DPMPTSP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat kasih dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Kewenangan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam memberikan Pelayanan Perizinan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, walaupun penulis menyadari bahwa hasilnya jauh dari kata sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H** sebagai Pembimbing sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran-saran sehingga penulis skripsi tugas akhir ini dapat di selesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA, Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara di Universitas Bung Hatta Padang.
4. Ibu Nurbeti, S.H,.M.H sebagai Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H,.M.H sebagai Dosen Penguji II.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, terimakasih atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis.

6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sangat banyak membantu proses penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Terima kasih kepada Papa Parulian Marpaung dan Mama Hermani br Saragih tercinta yang telah mendidik dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang selalu berdoa dan memberi semangat kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Kakak Yuliati Marpaung, S.I.Kom dan Abang Zulfian Marpaung yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis selama ini.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta teristimewa kepada Angkatan 2019 atas dukungan dan doa kepada penulis.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Padang, 5 Agustus 2023

Penulis,

Nofriadi Marpaung

1910012111002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisa Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	11
1. Pengertian Kewenangan.....	11
2. Sumber-sumber Kewenangan	12
B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
1. Pengertian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13
2. Tugas dan Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	13
3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang	15
4. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.....	17
C. Tinjauan Tentang Perizinan	18
1. Pengertian Izin	18

2. Tujuan Perizinan	22
3. Fungsi Perizinan.....	23
4. Unsur-unsur Perizinan.....	24
D. Tinjauan Tentang Pelayanan	26
1. Pengertian Pelayanan	26
2. Fungsi Pelayanan	28
3. Bentuk Pelayanan.....	28
4. Kualitas Pelayanan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dalam memberikan Pelayanan Perizinan	45
B. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kota Padang	46
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dalam mengatasi Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran.....	52

DAFTAR PENUTUP

DAFTAR KEPUSTAKAAN